



**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS APLIKASI SISKEUDES DI KANTOR DESA KOLAM*****ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT
ACCOUNTING STANDARDS BASED ON THE SISKEUDES APPLICATION
IN THE KOLAM VILLAGE OFFICE*****Maria Elpida Manalu¹, Tia Handani², Putri Kemala Dewi Lubis³, Fadhil Irfansyah⁴**^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri MedanEmail : mariaelpidamanalu100@gmail.com¹, tiahndn30@gmail.com², fadhilirfansyah212@gmail.com³

Article Info**Article history :**

Received : 10-06-2024

Revised : 12-06-2024

Accepted : 15-06-2024

Published: 18-06-2024

Abstract

Implementation of Government Accounting Standards Based on Government Regulation No. 71 Year 2010 which regulates the use of accrual basis accounting in the presentation of financial statements. To facilitate the government in presenting financial statements, the Financial and Development and Financial Supervision (BPKP) and the Directorate General of Village Government Development Ministry of Home Affairs developed the Village Financial System application (SISKEUDES) application. The Village Financial System (SISKEUDES) application is an application that aims to improve the quality of village government financial governance. The purpose of this study was to determine the application of Government Accounting Standards based on the SISKEUDES application and what are the obstacles or barriers in its implementation. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results showed that with the implementation of the SISKEUDES application, employees are able to complete financial reports more quickly, and structured. As for obstacles that may be faced are input errors, this can be overcome by conducting performance evaluations.

Keywords: Government Accounting Standards, SISKEUDES

Abstrak

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang penggunaan akuntansi basis akrual dalam penyajian laporan keuangan. Untuk memudahkan pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan suatu aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis aplikasi SISKEUDES dan apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan aplikasi SISKEUDES, pegawai mampu menyelesaikan laporan



keuangan dengan lebih cepat, dan terstruktur. Adapun hambatan yang mungkin dihadapi adalah kesalahan input, hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan evaluasi kinerja.

Kata Kunci: *Sistem Akuntansi Pemerintahan, SISKEUDES*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang standar akuntansi pemerintahan, melalui PP Nomor 71 Tahun 2010, yang mengatur tentang penggunaan basis akrual dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah, untuk menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005. Basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh suatu transaksi pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Kawedar, et. al., 2008: 86). Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini diadopsi dari keberhasilan pemerintah negara-negara maju untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah, seperti Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, Inggris dan Swedia, serta menjadi kesatuan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintah. Adanya standar dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan sehingga lebih terukur, terstruktur dan dapat dibandingkan, sesuai dengan indikator yang digunakan dalam pelaksanaan good governance.

Pemerintahan desa sebagai struktur pemerintahan terkecil di Indonesia memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara administratif, serta memperoleh dana desa yang diterima melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Namun, penyaluran dana desa yang sangat besar menuntut aparat pemerintah desa untuk semakin cermat dalam mengelola keuangan desa. Realita yang terjadi ternyata tidak sedikit pemerintah desa melakukan penyelewengan terhadap dana desa/anggaran desa. Berdasarkan pantauan ICW (Indonesia Corruption Watch) tentang praktek korupsi penggunaan dana desa yang ditangani sejak 2018 hingga 2020, terdapat 110 kasus korupsi anggaran desa yang terjadi.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan launching aplikasi Siskeudes Rilis dan pembagian data base. Aplikasi ini diharapkan dapat menimalisir hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah daerah dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan bagaimana aplikasi ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan paham post positivisme sebagai landasan berpikirnya yang digunakan untuk meneliti-meneliti suatu kondisi objek alamiah, dalam metode penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara gabungan serta analisis data yang digunakan oleh metode penelitian kualitatif bersifat induktif/kualitatif sehingga hasil dari penelitiannya lebih memfokuskan pada makna dibandingkan keseluruhan. (Sugiyono, 2016). Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Desa Kolam tepatnya di Kantor Desa Kolam yang ada di Jl. Utama 1 No.105, Sei Rotan, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 2037. Subjek yang dijadikan pada penelitian adalah salah satu pegawai di Kantor Desa Kolam yaitu Bendahara Kantor Desa Kolam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari artikel, buku, website, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik dalam mengumpulkan data data yang dibutuhkan.

1. Observasi

Pada Teknik observasi, peneliti melakukan observasi langsung ke Kantor Desa Kolam untuk mengamati, mencari informasi lebih dalam lagi mengenai bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan Desa Kolam, dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan khusus yang sebelumnya sudah dirancang terlebih dahulu oleh peneliti kepada Bendahara Desa Kolam.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana peneliti akan mengutarakan beberapa pertanyaan secara terstruktur yang sebelumnya telah disusun oleh peneliti. Dalam hal penelitian akan memberikan beberapa poin pertanyaan terkait penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan. Peneliti menanyakan langsung kepada bendahara Desa Kolam, selaku penyusun laporan keuangan di Desa itu.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti berguna sebagai penunjang dalam pengumpulan informasi yang didapat oleh peneliti. Dimana dengan adanya dokumentasi sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan observasi maupun wawancara ke Kantor Desa Kolam.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Aplikasi SISKEUDES terhadap Laporan Keuangan di Desa Kolam

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, yang mengatur tentang penggunaan basis akrual dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah, sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005 yang masih menggunakan basis kas menuju akrual, maka Pemerintah baik pusat maupun daerah diberikan amanat untuk menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual selambat-lambatnya pada tahun 2015.

Untuk membantu kegiatan pelaporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat membantu entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan.

SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) atau yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan dalam mewujudkan amanat sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aplikasi berbasis online ini dikembangkan dengan tujuan untuk membantu kinerja Pemerintah Desa dalam menyajikan laporan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Sistem keuangan desa (SISKEUDES) digunakan oleh desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi yang diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015 kini sudah digunakan 93,96% di seluruh desa di Indonesia per Desember 2022. Penetapan SISKEUDES ini menghasilkan pengelolaan Keuangan dan pembangunan yang lebih akuntabel pada 52.247 desa di Indonesia.

Penggunaan SISKEUDES dapat mempermudah pegawai pemerintah dalam menyusun laporan Keuangan dimana dengan sekali proses penginputan berdasarkan transaksi yang ada, SISKEUDES dapat langsung menghasilkan output berupa dokumendokumen penatausahaan maupun laporan-laporan sesuai perundang-undangan yang terdiri atas, sebagai berikut : 1. Dokumen Penatausahaan; 2. Bukti Penerimaan; 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 4. Surat Setoran Pajak (SSP); 5. Dan dokumen-dokumen lainnya; 6. Laporan-laporan; 7. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana); dan 8. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register.

Sesuai dengan pernyataan Presiden RI (2017) yang menegaskan agar SISKEUDES diterapkan di seluruh pemerintah desa di Indonesia maka Desa Kolam yang merupakan salah satu dari Pemerintahan Desa yang berada di Indonesia juga ikut menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis aplikasi SISKEUDES pada pelaporan keuangan desa tersebut, dimana pada periode 2017 hingga 2023 masih dilakukan dengan cara offline dan baru pada tahun 2024 dilakukan langsung atau dengan cara online. Menurut pegawai Kantor Desa Kolam mengatakan bahwa desa tersebut terus melakukan upgrade pada versi aplikasi SISKEUDES yang digunakan, hal ini bertujuan untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan memiliki standar yang baik. Penggunaan aplikasi SISKEUDES juga dianggap mempercepat proses penyajian laporan keuangan



karena pegawai tidak lagi mencatat secara manual atau dengan menulis di buku. Hal ini memungkinkan pegawai bekerja lebih cepat dan akurat dalam menyajikan setiap unsur laporan keuangan desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Bendahara Kantor Desa Kolam diketahui bahwa terdapat 4 (empat) tahapan dalam menyajikan laporan keuangan melalui aplikasi SISKEUDES, antara lain :

1. Tahap pertama : Perencanaan

Pada tahap perencanaan, terdapat rencana jangka panjang Kantor Desa Kolam yang berupa visi dan misi Desa tersebut sebagai pedoman dalam membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Bagian tersebut merupakan bagian terpenting karena berfungsi untuk memastikan kegiatan penyajian laporan keuangan pada desa tersebut berjalan lurus untuk kemajuan desa. Oleh karena itu, setiap entitas kantor desa terlebih dahulu harus melakukan perundingan karena tahap perencanaan ini merupakan dasar untuk melaksanakan pelaporan keuangan desa tersebut.

Proses selanjutnya dalam tahap perencanaan adalah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dalam penyusunan RPJM Desa, pegawai telah mempersiapkan bentuk-bentuk dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Desa untuk melaksanakan pembangunan terhadap Desa tersebut. RPJM ini nantinya digunakan sebagai acuan dalam membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP).

2. Tahap Kedua : Penganggaran

Tahap penganggaran merupakan tahapan dimana menerjemahkan setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan desa untuk melakukan pembangunan dalam bentuk anggaran. Dalam tahap penganggaran, pegawai Kantor Desa Kolam terlebih dahulu harus menetapkan dua hal awal, yaitu :

a. Pendapatan.

Pendapatan merupakan anggaran yang digunakan dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, anggaran dapat berasal dari pusat yang berbentuk APBDes, atau dari daerah yang bernama Alokasi Dana Desa atau hasil pajak.

b. Belanja.

Belanja pada aplikasi SISKEUDES berisi anggaran yang akan digunakan untuk dibelanjakan keperluan-keperluan yang bertujuan untuk pembangunan desa, ataupun biaya untuk membayar gaji pegawai. Baik pendapatan maupun belanja, keduanya harus di-input dengan benar pada aplikasi SISKEUDES karena kesalahan input akan berimbas pada laporan yang akan diserahkan setelahnya.

Setelah menetapkan keduanya, maka Kantor Desa menyusun APBDes dan mengajukan APBDes tersebut kepada Kecamatan dan Kabupaten untuk permohonan pencairan atas



dua tahapan sebelumnya. Setelah disetujui oleh Kecamatan dan Kabupaten maka keluarlah APBDes, setelahnya permohonan dicairkan ke rekening desa untuk akhirnya dana tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Tahap Ketiga : Penatausahaan

Tahapan penatausahaan berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan desa beserta banyak anggaran yang telah digunakan dalam realisasi anggaran-anggaran tersebut. Pencatatan pada tahapan penatausahaan ini harus dicatat secara sistematis dan kronologis atas setiap transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan desa untuk dimasukkan dalam aplikasi SISKEUDES.

4. Tahap Keempat : Tahap Pelaporan atau Pertanggungjawaban

Tahapan terakhir yaitu tahap pelaporan atau pertanggungjawaban merupakan hasil akhir yang menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan atas setiap kegiatan maupun transaksi yang dilakukan atas realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahapan ini, desa akan secara langsung mendapatkan laporan mengenai laporan perencanaan desa, laporan penganggaran desa, laporan penatausahaan, dan laporan pembukuan pada periode tertentu atau periode yang telah dilaksanakan.

Kendala atau Hambatan dalam Penerapan Aplikasi SISKEUDES di Desa Kolum

Menurut Sulina, Wahyuni, dan Kurniawan (2017) bahwa pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan membangun aplikasi tata kelola keuangan menggunakan sistem keuangan desa (SISKEUDES). Sistem keuangan desa (SISKEUDES) secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data (Rivan dan Maksum, 2019). SISKEUDES secara umum memberikan manfaat berupa keefektifan, keefisienan, dan ekonomis kepada pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bendahara Kantor Desa Kolum penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam menyajikan laporan keuangan memberikan manfaat yang besar, yaitu dengan adanya aplikasi SISKEUDES ini pegawai mampu menyelesaikan laporan keuangan dengan lebih cepat, dan terstruktur. Namun, juga diketahui bahwa dengan berbagai kelebihan yang didapat melalui penggunaan aplikasi SISKEUDES, ternyata terdapat kendala yang dapat saja terjadi pada saat menyajikan laporan keuangan pada saat menggunakan aplikasi tersebut. Dalam wawancara, Bendahara menjelaskan bahwa kendala yang mungkin terjadi dalam melaksanakan pelaporan keuangan melalui aplikasi SISKEUDES adalah kesalahan input. Kesalahan input dapat saja terjadi dalam menuliskan jumlah anggaran ataupun keterangannya. Sehingga setiap angka yang dituliskan diharuskan tepat karena akan berdampak pada tahap berikutnya. Sebagai contoh, jika pada saat tahap perencanaan dan penganggaran terjadi kesalahan input data, maka hal tersebut ikut berdampak pada laporan yang akan diserahkan pada Kecamatan dan Kabupaten, dimana laporan tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan mereka untuk mengeluarkan dana APBDes.



Dengan adanya kendala berupa kesalahan input tersebut maka diperlukan ketelitian serta kefokuskan saat melakukan pelaporan keuangan melalui aplikasi SISKEUDES. Salah satu upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja menurut Irham Fahmi (2014: 237) adalah penilaian yang dilakukan oleh manajemen organisasi kepada pegawai terhadap pekerjaan yang selama ini menjadi tanggung jawabnya. Melakukan evaluasi kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja pegawai atau lebih spesifik untuk mengetahui kinerja Bendahara apakah mengerjakan pelaporan keuangan dengan baik dan benar atau terdapat kesalahan didalamnya. Dengan adanya evaluasi kinerja maka diharapkan untuk pegawai mempertahankan kualitas pelaporan keuangan ataupun memperbaiki kesalahan jika telah melakukan kesalahan sebelumnya.

KESIMPULAN

Penerapan Siskeudes di kantor desa memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Namun, perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas aparat desa dan menyempurnakan Siskeudes agar lebih sesuai dengan SAP. Siskeudes menyediakan platform digital untuk mencatat dan melaporkan seluruh transaksi keuangan desa secara terstruktur dan sistematis. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan desa dengan mudah melalui internet atau melalui sosialisasi oleh pemerintah desa. Masyarakat dapat memantau alokasi dan penggunaan dana desa secara berkala melalui laporan keuangan yang dihasilkan Siskeudes. Hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah desa dan meminimalisir potensi penyalahgunaan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(3), 403-428.
- Ikyarti, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131-140.
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah kota bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Mentu, E., Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1392–1399.
- Puspasari, O. R., & Purnama, D. (2018). Implementasi sistem keuangan desa dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa di kabupaten kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 145-159.
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 92-100.



Sanjaya, A., Rasuli, M., & Haryani, E. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SKPD Ka (Doctoral dissertation, Riau University).

Simanjuntak, B. H. (2005). Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 1–15.